

IMPLEMENTASI PROGRAM PINJAMAN BERGULIR KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN DI DESA LOA DURI ULU KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sajida Ulfah¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Fokus penelitian implementasi program pinjaman bergulir dengan indikator pelaksanaan, pelaporan dan monitoring serta faktor penghambat dan pendukung implementasi program pinjaman bergulir KUBP di Desa Loa Duri Ulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif model interaktif menurut Matthew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan implementasi program pinjaman bergulir KUBP di Desa Loa Duri Ulu pinjaman bergulir belum optimal, karena masih banyak yang mengajukan tidak sesuai persyaratan akan tetapi diterima pinjaman bergulirnya yang berdampak pada pengembalian dana tidak berjalan lancar. Pelaporan kurang maksimal karena selama ini yang memberikan pelaporan hanya dari pihak bank dan kecamatan, tanpa melalui kantor desa. Monitoring masih kurang maksimal, pengembalian pinjaman bergulir banyak yang telat. Faktor pendukung dan penghambat implementasi program pinjaman bergulir KUBP di Desa Loa Duri Ulu yaitu penghambat berupa dukungan dan informasi, sedangkan pendukung berupa komunikasi.

Kata Kunci : Implementasi, Pinjaman Bergulir, KUBP.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara nasional berakhir. Hal ini seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan diberhentikan program PNPM Mandiri, maka pemerintah akan mengganti dengan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (PPID-K). Hal ini dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan dana desa akan dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa. Untuk itu dilaksanakan alih kelola pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dalam upaya memberantas kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menyalurkan dana pinjaman bergulir khusus untuk perempuan, melalui Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yang di bawah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara (BKBP3A) sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 000/3125/BKBP3A/XI/2011 Tanggal 28 November 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP). Hal ini dikarenakan perempuan cenderung memiliki keterampilan lain selain mengurus rumah tangga, yang dapat diusahakan dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, akan tetapi cenderung mengalami keterbatasan modal, sehingga usaha kurang berjalan lancar.

Desa Loa Duri Ulu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani, kemudian disusul dengan penambang dan pedagang. Potensi usaha kecil masyarakat Desa Loa Duri Ulu relatif bagus. Namun sangat disayangkan masyarakat Desa Loa Duri Ulu khususnya perempuan tidak dapat berbuat banyak karena terkendala modal dan keterbatasan pendidikan dalam mengembangkan usaha mereka. Melihat keadaan ini, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu memberikan pinjaman dana bergulir untuk modal bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yang ada di Desa Loa Duri Ulu sangat besar. Saat ini KUBP di Desa Loa Duri Ulu yang telah menerima bantuan pinjaman bergulir terdapat 5 kelompok.

Namun berdasarkan observasi pendahuluan di Desa Loa Duri Ulu, pelaksanaan pinjaman bergulir KUBP dirasakan masih belum optimal. Dimana masih terdapat masyarakat khususnya perempuan, yang memiliki usaha seperti membuat tempe, keripik tempe, ikan asin maupun usaha kecil lainnya akan tetapi belum dapat memperluas usahanya. Terdapat fenomena dalam pemberian pinjaman bergulir KUBP di Desa Loa Duri Ulu, meliputi :

1. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang pinjaman bergulir KUBP.
2. Tidak mengetahui syarat agar mendapatkan pinjaman bergulir KUBP.
3. Masyarakat salah dalam pengelolaan dana yang diterima, mengakibatkan lupa akan kewajiban yang harus dilakukan oleh KUBP pasca pencairan pinjaman modal, baik mengenai tata cara pengembalian.

4. Jarang dilakukan monitoring dan pengawasan dari Kepala Desa untuk memantau usaha KUBP tersebut berikut dengan setorannya secara periodik.

Melihat hal tersebut, program pinjaman bergulir KUBP belum terimplementasikan dengan optimal, dimana selama ini masyarakat yang mengikuti program pinjaman bergulir KUBP melakukan pengurusan langsung ke kecamatan dan keputusan disetujui atau tidaknya pinjaman tersebut ditindak lanjut langsung di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, tanpa melalui persetujuan dan pengecekan dari Kantor Desa Loa Duri Ulu atas usaha yang dilakukan KUBP yang mengajukan pinjaman bergulir. Akibatnya kesenjangan tidak merata yaitu masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan dalam mengembangkan usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil Judul : “Implementasi Program Pinjaman Bergulir Kelompok Usaha Bersama Perempuan Di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara).

Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam konsep kebijakan publik khususnya implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan karya ilmiah di Universitas Mulawarman.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan sebagai berikut :
 - a. Menjadi masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
 - b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Pressman dan Wildavsky sebagaimana dikutip Winarno (2012:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Implementasi

Implementasi merupakan sebagai evaluasi (Majone dan Wildavsky dalam Usman, 2016:70). Implementasi berarti juga adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Browne dan Wildavsky dalam Usman, 2016:70). Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Perempuan

Ihromi (2015, 142-143) mengatakan bahwa membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.

Pinjaman Bergulir

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil (UKP) Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pasal 1 ayat 4 disebutkan dana Bergulir Kredit UKP adalah Kredit Usaha Kecil Perdesaan yang berasal dari pengembalian pinjaman Usaha Kecil Perdesaan yang disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah untuk disalurkan kembali kepada usaha kecil dan mikro lain.

Definisi Konseptual

Implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program pinjaman bergulir KUBP melalui

pengendalian pelaksanaan, pelaporan dan monitoring program pinjaman dana bergulir KUBP di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Fokus Penelitian

1. Implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil (UKP) Di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan
 - b. Pelaporan
 - c. Monitoring
2. Faktor penghambat dan pendukung implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari :
 - a. Informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala BKBP3A di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Desa Loa Duri Ulu.
 - b. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yang ditentukan berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu Perwakilan Badan Perwakilan Desa Loa Duri Ulu.
 - c. Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu masyarakat atau anggota KUBP yang mengikuti program pinjaman bergulir di Desa Loa Duri Ulu yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling* berjumlah 2 orang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain kondisi Desa Loa Duri Ulu meliputi sejarah, keadaan geografis, penduduk, agama, pendidikan, infrastruktur, serta buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan

ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.

2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dkk (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penyimpulan / Verifikasi (*Drawing ang Verifying Conclusions*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pinjaman Bergulir Kelompok Usaha Bersama Perempuan Di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Program Kegiatan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal bagi Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) merupakan pemberian bantuan usaha dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kelompok Usaha Perempuan yang merupakan kelompok yang terdiri dari perempuan yang melakukan usaha baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis disetiap desa/kelurahan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian pelaksanaan dapat diketahui pula sebagai aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pinjaman bergulir belum optimal, karena masih banyak yang mengajukan tidak sesuai persyaratan akan tetapi diterima pinjaman bergulirnya yang berdampak pada pengembalian dana tidak berjalan lancar.

Calon penerima pinjaman bergulir disetujui menerima dana bantuan jika memenuhi syarat sesuai ketentuan yaitu pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha, jenis pinjaman untuk penambahan modal kerja dan atau investasi

usaha produktif UMK, Plafond pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- per Usaha Mikro dan Rp. 50.000.000,- per Usaha Kecil, jangka waktu pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun, tingkat suku bunga/jasa pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil (penerima akhir), sesuai dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan, jadwal pembayaran angsuran pokok dan bunga/jasa pinjaman kepada KSP/USP–Koperasi Primer dibayarkan sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan pinjaman, perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP/USP–Koperasi Primer.

Tatacara pencairan dana maupun pengguliran dana kepada calon penerima pinjaman bergulir yaitu KSP/USP-Koperasi yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada LPDB KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berupa proposal pinjaman yang berisikan antara lain rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian pinjaman; kelengkapan legalitas KSP/USP-Koperasi, antara lain Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perijinan lainnya; Daftar calon penerima pinjaman (daftar nominatif); laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; laporan pertanggung jawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disyahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Adapun yang memegang peranan dalam menyetujui pencairan dana maupun pengguliran dana kepada calon penerima pinjaman bergulir yaitu KSP/USP-Koperasi Primer yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada KSP/USP–Koperasi Sekunder, sesuai ketentuan yang berlaku di KSP/USP- Koperasi Sekunder. Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada KSP/USP–Koperasi Primer, sesuai ketentuan yang berlaku di KSP/USP–Koperasi Primer. Surat permohonan sebagaimana dimaksud, ditembuskan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dimana KSP/USP–Koperasi Primer berdomisili.

Ada beberapa tahapan dalam siklus kebijakan publik dan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi

alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan, oleh bawahan tersebut bertanggungjawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaporan implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kurang maksimal karena selama ini yang memberikan pelaporan hanya dari pihak bank dan kecamatan, tanpa melalui kantor desa yang mengetahui seluk beluk KUBP yang bersangkutan di Kantor Desa Loa Duri Ulu, sehingga terjadi penunggakan pembayaran pinjaman bergulir karena tidak mengetahui seluk beluk KUBP yang bersangkutan. Bank Pembangunan Daerah Cabang membuat laporan hasil evaluasi, perkembangan penyaluran dan pengembalian kredit KUBP di Desa Loa Duri Ulu kepada BKBP3A di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemberi persetujuan pemberian pinjaman bergulir.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, maka bank selaku pemberi pencairan pinjaman bergulir kepada KUBP wajib memberikan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Monitoring

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan dan monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa monitoring implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang maksimal karena monitoring penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, dan pengguliran dana KUBP di Desa Loa Duri Ulu cukup berjalan baik sedangkan pengembalian tidak. Adapun perkembangan usaha KUBP di Desa Loa Duri Ulu ada yang lebih baik dan ada juga yang tidak karena pengelolaan yang salah.

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Tujuan monitoring adalah menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar dan melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Monitoring, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan monitoring dilakukan terhadap komponen-komponen program. Monitoring selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi, mempunyai hubungan erat dengan penilaian program.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program Pinjaman Bergulir Kelompok Usaha Bersama Perempuan Di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dukungan dan informasi program pinjaman bergulir.

1. Dukungan

Dukungan adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dukungan juga dapat diartikan sebagai memberikan dorongan atau motivasi atau semangat dan nasihat kepada orang lain dalam situasi pembuat keputusan.

Berdasarkan hasil observasi pemerintah khususnya Kantor Desa Loa Duri Ulu masih kurang dukungannya terhadap program peminjaman dana bergulir kepada KUBP.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah sejak beberapa tahun menggalakkan program kewirausahaan bagi masyarakat umum, pemuda dan mahasiswa. Program-programnya pun bervariasi, mulai dari pemberian modal kecil untuk usaha rumahan, hingga program wirausaha mahasiswa yang tersebar tak hanya di Universitas negeri tetapi juga swasta di seluruh Indonesia. Proposal bervariasi bernilai mulai dari 1 hingga 10 juta rupiah. Tahun lalu pun diadakan seminar kewirausahaan gratis untuk umum yang mendatangkan pengusaha-pengusaha muda yang sukses di Indonesia, tujuannya adalah untuk menginspirasi lebih banyak pengusaha muda dalam mengembangkan bakat bisnis serta memulai usaha mikro. Berikut ini adalah manfaat dukungan pemerintah pada UKM untuk menyokong perekonomian nasional Indonesia :

a. Menyerap Lebih Banyak Pekerja

UKM ini dianggap sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan badan usaha milik negara atau swasta lainnya. Seperti kita tahu bahwa kebanyakan perusahaan kelas atas akan memerlukan tenaga profesional terampil dengan pendidikan tinggi. Meninggalkan yang tidak memiliki pendidikan tinggi tanpa pekerjaan. Beruntunglah dengan adanya UKM maka lapangan kerja terbuka lebih

maksimal dan menyerap lebih banyak pekerja bahkan yang memiliki pendidikan paling rendah.

b. Menambah Pemasukan Devisa Negara

Beberapa produk UKM berskala menengah telah berhasil menembus pasar internasional melalui ekspor sehingga menambah pemasukan negara, tidak hanya dari segi migas saja. Potensi ini akan terus bertambah apabila negara semakin mendukung perkembangan UKM, melihat potensi secara teliti dan memodali dengan pendanaan yang lebih baik.

c. Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Alam

Dengan adanya dukungan pemerintah dalam membantu membiayai usaha kecil dan menengah maka akan merangsang lebih banyak orang dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Tentu saja ini lebih baik daripada apabila SDA kita dikuasai oleh orang asing. Hal ini juga dapat membuat kita lebih independen dalam SDA seperti bahan pangan dan pakaian agar tidak selalu tergantung pada hasil impor akibat perdagangan bebas.

Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah semakin meningkatkan bantuan berupa finansial, penyuluhan serta pelatihan bagi pengusaha-pengusaha muda Indonesia agar semakin bermunculan dan membuat ekonomi kita menjadi lebih baik. Hal ini juga agar Indonesia dapat semakin maju di kancah perdagangan internasional.

2. Informasi

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan.

Berdasarkan observasi diketahui banyak masyarakat yang kurang mengetahui pinjaman bergulir bagi KUBP. Dalam perumusan/pembuatan kebijakan, diperlukan informasi, yang berasal dari data yang telah diolah. Misalnya pemerintah akan merumuskan/membuat kebijakan kependudukan, maka untuk ini diperlukan informasi tentang pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, kualitas dan struktur umur penduduk. Apabila pemerintah ingin merumuskan/membuat kebijakan ekonomi, maka diperlukan informasi tentang sektor-sektor yang potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah dan digunakan untuk memberi dukungan keterangan untuk pembuatan keputusan. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bennakna dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa pemakaian informasi itu penting, karena informasi yang dipakai untuk menunjang pembuatan keputusan.

Untuk membuat kebijakan diperlukan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali

efektifitas kebijakan publik. Mengenai syarat-syarat informasi yang baik, sebagai berikut :

- a. Ketersediaan
Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
- b. Mudah dipahami.
Informasi harus mudah dipahami oleh pemfctuat kebijakan.
- c. Relevan.
Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan denganpermasalahannya.
- d. Bermanfaat
Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.
- e. Tepat waktu
Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
- f. Keandalan
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.
- g. Akurat
Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.
- h. Konsisten.
Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu komunikasi yang baik.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris disebut *communication*, yang berasal dari kata *communication* atau *communis* yang memiliki arti sama atau sama yang memiliki makna pengertian bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Berdasarkan observasi di lapangan diketahui komunikasi yang terjalin antara berbagai pihak dalam pemberian pinjaman bergulir baik. Komunikasi mempunyai andil membangun iklim organisasi, yang berdampak kepada membangun budaya organisasi, yaitu nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan, baik dengan para karyawan maupun dengan kha layak yang ada kaitannya dengan organisasi, dalam rangka

pembinaan kerja sama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Komunikasi memiliki hubungan yang erat sekali dengan kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa komunikasi. Apalagi syarat seorang pemimpin selain ia harus berilmu, berwawasan kedepan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani dan rohani, ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi akan menentukan berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pemimpin memiliki pengikut guna meralisir gagasannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Disinilah pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi seorang pemimpin, khususnya dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Inilah hakekatnya dari suatu manajemen dalam organisasi.

Proses komunikasi yang efektif memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Informasi harus dikomunikasikan kepada stafnya agar mereka mempunyai dasar perencanaan, agar rencana-rencana itu dapat dilaksanakan. Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan mereka. Pengarahan mengharuskan manajer untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Jadi seorang manajer akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal, karena masih banyak yang mengajukan tidak sesuai persyaratan akan tetapi diterima pinjaman bergulirnya yang berdampak pada pengembalian dana tidak berjalan lancar.
2. Pelaporan program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kurang maksimal karena selama ini yang memberikan pelaporan hanya dari pihak bank dan kecamatan, tanpa melalui kantor desa yang mengetahui seluk beluk KUBP yang bersangkutan di Kantor Desa Loa Duri Ulu, sehingga terjadi penunggakan pembayaran pinjaman bergulir karena tidak mengetahui seluk beluk KUBP yang bersangkutan.
3. Monitoring program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang maksimal, karena pengembalian pinjaman bergulir banyak yang telat.
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu untuk penghambat berupa dukungan dan informasi program pinjaman bergulir, sedangkan pendukung berupa komunikasi yang baik dalam bekerja.

Saran

1. Pelaksanaan program pinjaman bergulir kelompok usaha bersama perempuan di Desa Loa Duri Ulu yang diterapkan oleh BKBP3A diharapkan sesuai prosedur yaitu berdasarkan Prosedur Permohonan Pinjaman Bergulir, Prosedur Evaluasi dan Analisis Sistem, Prosedur Keputusan Pinjaman Bergulir, Prosedur Perjanjian Pinjaman Bergulir, Prosedur Pencairan Pinjaman Bergulir dan Prosedur Pelunasan.
2. Sebaiknya BKBP3A memahami ruang lingkup pekerjaan, serta pemerintah yang berhubungan dengan pinjaman bergulir khususnya pemerintah desa diberi penjelasan mengenai tugas, tanggungjawab dan wewenang akan tugas yang dilaksanakan sehingga alur pelaporan kerja (informasi, komunikasi, koordinasi) dapat diketahui dan dijalankan dengan baik.
3. Sebaiknya BKBP3A bekerja sama dengan Pemerintah Desa Loa Duri Ulu secara rutin melakukan pencatatan dan cross checkakuntansi atas transaksi yang terjadi setiap harinya serta pengisian KSPA (Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota) harus dilakukan setiap hari untuk mendukung pelaksanaan proses evaluasi dan analisis pemberian pinjaman bergulir.
4. Sebaiknya anggota KUBP diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai peran pinjaman bergulir dan tujuannya, sehingga penyampaian dana dapat terarah dan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ihromi, TO. 2015. *Kegiatan Wanita Dalam Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Usman, Nurdin. 2016. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bintang Pustaka. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil (UKP) Di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.